

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYALURAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021**

**(Studi Pada Desa Kucur, Kecamatan Dau)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



**DISUSUN OLEH:**

**MILTIADES ASCEN JORAT**

**2018210059**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

**MALANG**

**2022**

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYALURAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021**

**Miltiades Ascen Jorat, Dody Setyawan<sup>1</sup>, Ignatius Adiidjaja<sup>2</sup>**

*Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,  
Tribhuwana Tungadewi University, Malang. E-mail: ascenjorat@gmail.com*

**ABSTRAK**

Bantuan Langsung Tunai ialah diantara bagian Program dibentuk oleh Pemerintah untuk warga negara yang terdampak akibat covid-19 agar ekonomi dan kesehatan masyarakat dapat terlindungi. Program BLT bertujuan sebagai bantuan kesulitan ekonomi masyarakat desa akibat dampak dari covid 19. Pemerinta Desa ialah lembaga pemerintah yang berfungsi mengatur wilayah tingkat desa dan berwenang melaksanakan rumah tangga Desa. Riset berikut memiliki tujuan ialah sebagai pengetahuan terkait bagaimana evaluasi menyalurkan BLT DD di Desa Kucur. Fokus penelitian ini meliputi Evaluasi kebijakan Pemerintah dalam penyaluran BLT DD periode 2021 dan juga ingin tahu faktor yang menghambat dan mendukung. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Kucur, Kepala Urusan Keuangan Desa Kucur, Badan Permusyawaratan Desa Kucur, dan Keluarga Penerima Manfaat. Untuk mengumpulkan data dengan cara mewawancarai, observasi dan mendokumentasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Pemerintah Desa Kucur telah melakukan penyaluran BLT DD periode 2021 sesuai mekanisme yang diatur dalam aturan Pemerintah Pusat dan dalam proses pelaksanaannya sudah berjalan efektif sehingga penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Desa mampu membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi akibat Covid-19.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kebijakan Pemerintah, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, covid-19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Isu pandemi virus corona telah menjadi pusat perhatian masyarakat lokal dunia setelah laporan kasus pertama infeksi virus corona di Wuhan, China menjelang akhir tahun 2019, sejak itu media pemerintah China telah mengungkapkan serius terkait Covid yang ditemukan pada bundling makanan beku impor. Kontaminasi Covid ialah penyakit yang disebabkan oleh Covid dan menyebabkan efek samping mendasar seperti masalah pernapasan. Diketahui bahwasannya di Indonesia sejak keberadaan covid-19 pada bulan maret 2020 lalu sangat mempengaruhi kestabilan kesehatan masyarakat dan bukan hanya selesai disitu saja. Covid-19 ini juga berdampak pada segala sektor kehidupan seperti Perekonomian, pembangunan dan pendidikan.

Ketidakpastian berakhirnya pandemi covid-19 sampai hari ini di Tahun 2021 ialah suatu babak baru setiap pemerintahan di Indonesia untuk mensiasati penanggulangan dampak pandemi virus corona yang berdampak pada terhentinya pembangunan moneter publik, penurunan pendapatan negara, dan peningkatan belanja negara melalui pendanaan. Kemudian langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam mendukung ketahanan perekonomian masyarakat selama pandemi melalui kebijakan bantuan sosial dari berbagai Menteri diantaranya ialah BLT DD dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah yang Tertinggal dan Transmigrasi, ini tercantum pada Peraturan

Menteri Desa, Membangun Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI No. 13 Tahun 2020 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Berdasarkan Pedoman Menteri Desa, PDT Keimigrasian Nomor 13 Tahun 2020 terkait Perlunya Pemanfaatan Keuangan Desa Dalam Bagian I Penataan Umum Nomor 18 Uang Aset Desa Bantuan Langsung ialah tindakan memberikan bantuan langsung dengan jenis cadangan uang yang diperoleh dari aset desa. untuk keluarga penerima dengan model yang disetujui dan dipilih oleh komite desa. Dalam pedoman ini, pemerintah desa diharapkan untuk fokus pada pemanfaatan aset desa pada tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan kecenderungan desa baru dengan tujuan akhir untuk membuat desa tanpa kebutuhan melalui bantuan ramah langsung dari cadangan desa.

Bantuan dana segera dari dana cadangan desa ialah diantara bantuan Program Jaring Jamsostek Non Biasa yang diberikan oleh pemerintah pusat selama masa pandemi virus corona, penerima bantuan ini ialah warga yang dikenang dengan ragam informasi RT/RW di desa tersebut, sedangkan untuk orang-orang yang terdaftar sebagai anggota program Kelompok Percaya Diri dari Layanan Pesta, Bantuan Makanan Non-Uang, Kartu Pra-Bisnis, dan kerabat yang tidak berdaya terhadap penyakit berkelanjutan/terus-menerus, tidak dapat memperoleh bantuan ini.

Komponen penghimpunan informasi dan BLT DD, sebagaimana diketahui, harus diarahkan pada pedoman yang diberikan oleh otoritas publik, sebagai tindakan untuk mengendalikan pemanfaatan cadangan desa. Dinas

Uang telah memberikan Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor 222/PMK.07/2020 pada tanggal 28 Desember 2020 di Jakarta, Jawa Timur Perwakilan Pimpinan Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 terkait Pokok-pokok Kedaulatan dan Proyek Penguatan Desa Dalam Rangka Pemulihan Moneter Wilayah Jawa Timur, Peraturan Daerah Desa Malang Nomor 3 Tahun 2021 terkait Sistem Penjaminan dan Kehalusan Pendukung Desa di Setiap Desa dan Arahan Khusus Pemanfaatan Aset Desa Untuk Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya akan diatur ketentuan mekanisme penyaluran melalui peraturan yang di keluarkan pemerintah desa melalui Peraturan Kepala Desa.

Ketidak ikut sertaan pemerintah pusat dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai dana desa menjadi potensi besar penyalahgunaan dana bantuan langsung tunai dana desa tidak berjalan sesuai penegasan peraturan undang-undang. Kendati demikian dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dana desa kepada masyarakat penerima bantuan terdapat beberapa penyaluran bantuan sosial lainnya yang diperuntukan kepada masyarakat desa yang bersumber dari pemerintah pusat dan kelembagaan negara seperti Tentara Republik Indonesia (TNI) seperti bantuan sembako berupa beras 5kg (lima) untuk masyarakat terdampak pandemi, bantuan langsung tunai Kementrian Sosial dan bantuan lainnya yang termasuk dalam program jejaring pengaman sosial. Dari beragam jenis bantuan sosial tersebut sangat berpotensi terhadap orientasi penyaluran yang menguntungkan pihak tertentu.

Kemudian, pada saat itu, muncul beberapa isu yang disampaikan oleh Pendeta Uang Republik Indonesia Sri Mulyani bahwasannya ada hambatan di Pemerintah Provinsi termasuk undang-undang tidak resmi (perkada) terdekat yang masih dalam siklus cek dalam pemanfaatannya. seluk-beluk keuangan desa per desa. Kemudian, pemerintah lingkungan justru memberikan kebutuhan sebagai APBDes yang diubah, membuat hambatan memanfaatkan cadangan desa, pedoman wilayah (perda) pada APBD belum diperiksa dan ditentukan sehingga tidak terbayangkan untuk diharapkan untuk mengeksekusinya, termasuk cadangan desa. Sementara itu, di tingkat pemerintah desa, ditemukan beberapa persoalan yang menjadi kendala dalam pemanfaatan subsidi desa dalam membantu daerah dan penanganan virus corona, khususnya perencanaan dan penjaminan APBDes yang belum selesai pada tingkat desa, telah terjadi perubahan sehingga tidak ada kepala desa baru yang konklusif. ada desa yang APBDesnya masih dalam siklus konfirmasi di tingkat kecamatan. APBDes masih menunggu pengesahan dari Kelompok Masyarakat Penguatan Administrasi atau Pembatasan (DPMD), ada perencanaan dan pembatasan pedoman Kepala Desa yang dimodifikasi, Pemerintah Desa sedang menunggu peningkatan berkelanjutan dari Layanan Sosial informasi terkoordinasi dan perjuangan di bawah permukaan di Desa sehubungan dengan perubahan jumlah pertemuan penerima manfaat.

[www.Validnews.com](http://www.Validnews.com)

Dalam penelitian terkait penggunaan bantuan sosial uang langsung dari aset desa, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan

sebelumnya. Penelitian terkait keterusterangan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Uang Aset Desa (BLT) dilakukan oleh Tioma dan Nanang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya dalam pelaksanaannya terdapat keuntungan dan kerugian bagi penerima manfaat karena kurangnya data yang tepat untuk masyarakat umum (Hariandja dan Budiman, 2020), Ira Novianty dan kawan-kawan juga mengarahkan penelitian terkait dengan praktik perencanaan dan diseminasi bantuan cadangan desa selama pandemi Coronavirus. - 19, dampak dari tinjauan menunjukkan bahwasannya berbagai jenis bantuan dan sumber bantuan yang didapat oleh penghuni tidak didukung oleh kerangka data jaringan kesejahteraan sosial yang terkoordinasi di tingkat pusat, umum, wilayah, dan desa sehingga rencana keuangan berubah yang menekankan bantuan cadangan desa sangat sulit untuk dikeluarkan. sama karena terbatasnya rencana keuangan pemerintah desa (Novianty et al., 2020: 3).

Dari sebagian data dan kajian yang telah dilakukan, sangat terlihat bahwasannya persoalan BLT terkait dengan tanda penerima BLT, keterusterangan dalam menentukan penerima BLT., dan keterlambatan penentuan kebijakan oleh pemerintah daerah dan Desa sehingga penyaluran bantuan tidak dapat terealisasi. Peneliti menganggap bahwasannya hal ini perlu diperhatikan dalam proses evaluasi kebijakan agar peneliti dapat menemukan lebih detail lagi aspek pendukung dan penghambat penyaluran bantuan sosial serta menilai apakah masalah yang telah dilakukan relevan dengan mekanisme peraturan yang telah diatur pemerintah Indonesia,

Melalui laman resmi kemendespdtt Pada April Tahun 2020 Pemerintah Republik Indonesia telah mencairkan DD yang dimanfaatkan sebagai BLT sebesar 22,48 (dua puluh dua triliun empat puluh delapan juta rupiah) yang akan diterima oleh 12.490.000.000 (dua belas juta empat puluh sembilan) kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Malang yang termasuk penerima pencairan dana bantuan langsung tunai tersebut pada juni tahun 2020 melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Suwadji melaporkan penyaluran bantuan langsung tunai yang tidak berjalan mulus dengan terdapat 27 (dua puluh tujuh) desa yang belum menyalurkan bantuan karena menunggu pencairan tahap 2 (dua). [www.Malangtimes.com](http://www.Malangtimes.com)

Pemerintah Desa Kucur telah melakukan menyalurkan BLT DD periode 2021 menyalurkan dana bantuan langsung tunai dilakukan secara bertahap selama bulan januari sampai desember di tahun 2021, setiap warga terdata berhak mendapatkan tiga ratus ribu rupiah selama 12 bulan di tahun 2021 dengan sumber alokasi dana desa sebesar 40% sesuai dengan penegasan Perpres 104/2021 terkait detail Penggunaan APBN.

Selanjutnya penelitian terkait penilaian strategi penyampaian bantuan uang langsung kepada pemerintah desa Kucur mendukung menyinggung cara pendekatan yang telah dilakukan akan disurvei atau dinilai, hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaturan yang dilakukan dapat mengatasi masalah tersebut, oleh karena itu diperlukan petunjuk atau tindakan. model yang menyusun premis penilaian untuk mengevaluasi apakah pendekatan tersebut dapat mengatasi masalah tersebut. Mengikuti William N. Dunn (2003:

608-610), istilah penilaian dapat disamakan dengan evaluasi, penilaian, dan penilaian. Penilaian khawatir terkait penciptaan data terkait nilai atau keuntungan dari hasil strategi. Penilaian memberikan data yang substansial dan solid terkait pelaksanaan pendekatan, khususnya seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan pintu terbuka yang menakjubkan telah dicapai melalui kegiatan terbuka; penilaian menambah penggunaan teknik pemeriksaan strategi lainnya, termasuk perincian masalah dan saran. Oleh karena itu, terlepas dari kekhawatiran terkait keseluruhan proses pendekatan, penilaian strategi lebih khawatir terkait presentasi pengaturan, terutama pada pelaksanaan pendekatan publik. Penilaian pada "definisi" dilakukan pada sisi pasca kegiatan, yang lebih pada "siklus" perincian daripada substansi pendekatan yang biasanya "seolah-olah" mensurvei apakah siklus tersebut sesuai dengan strategi yang disepakati. Kenyataan seperti itu menggambarkan betapa pentingnya tahapan evaluasi kebijakan dalam mendeteksi kegagalan implementasi dan meminimalisir dampak kegagalan suatu kebijakan publik. Untuk itu judul diangkat dalam penelitian ini terkait "Evaluasi Kebijakan Pemerintah pada BLT DD saat coron virus"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melalui pemaparan diatas sehingga penulisan proposal skripsi ini, maka rumusan masalah yang dituliskan ialah:

1. Bagaimana Evaluasi menyalurkan BLT DD Pemerintah Desa Kukur?
2. Apa Sajakah Yang Menjadi Faktor yang mendukung Dan menghambat untuk menyalurkan Evaluasi BLT DD Pemerintah Desa Kukur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan permasalahan diatas sehingga riset berikut memiliki tujuan ialah:

1. Mengetahui bagaimana evaluasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa Pemerintah Desa Kucur.
2. Mengetahui terkait faktor yang menghambat dan mendukung evaluasi menyalurkan BLT DD Pemerintah Desa Kucur.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Riset berikut mempunyai fungsi kegunaan yang seperti dibawah ini:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diantara fungsi guna yang bisa diharapkan secara teoritis pada penulis skripsi ini ialah sebagai pengembangan intelektual, juga mengaplikasikan kajian ke praktik langsung selama didapat study dan perkembangan pengetahuan pada pembuatan karya ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

Adapun fungsi guna dengan cara langsung ialah:

1. Sebagai sumbangsi konseptuan untuk yang melakukan lebih-lebih terkait mengevaluasi menyalurkan BLT DD.
2. Bagi penulis sendiri, harapannya riset berikut bisa memberikan tambahan ilmu dan pengalaman untuk melaksanakan riset

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiwijaja&Suprojo, (2021). *Pelayanan Di Dinas Desa Batu Dalam Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Bagi Keluarga Miskin(PKH). Reformasi.ISSN:2088-7496*
- Ahmad Tubagus.2020. “39 Desa di Kabupaten Malang Belum Salurkan BLT-DD” *Malang:Malngtimes.*( Jun 01, 2020 16:39)
- Akibu Rifka.2014. *Evaluasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Sma Negeri 1 Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.* e-Jurnal Katalogis. SSN: 2302-2019
- Alfian Reza. 2021. “Sri Mulyani : Masih Ada Masalah Penyaluran dan Desa dan BLT” Jakarta Selatan:VALIDNEWS. (Sabtu 15 Januari 2022)
- Dunn, WN. (2015). *Analisis kebijakan publik.* Routledge.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua.* Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Ikrami, Riskami. 2020. “Pandemi Covid-19 dan Masalah Sosial”.Padang: PadekJawapos.com. (07 April 2020).
- Mohd. Ibnu Afandi, W. (2011). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Terkait Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perdesaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Desa Kisaran Barat).* Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal, 6(2), 92–113.
- Moleong, Lex J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Nomor:PER/04/M.PAN/4/2007.
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan Terkait Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Nomor 222/PMK.07/2020
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.* 1–12.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik.* Malang: Inteligencia Media.
- Singkoh, R. P. (2021). *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan,* EKSEKUTIF, ISSN : 2337-5736.

Sri Wibawani, F, H, (2021). *Evaluasi Program BLT Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Kemlagi, Kabuten Mojokerto*. Syntax idea, ISSN: 2684-6853 E-ISSN: 2684-883X.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suparman, N. (2017). *Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(2), 159. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9771>

Surat Edaran Direkrotal Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 12/PR1.00/IV/2020 perihal penegasan BLT-Dana Desa.

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PR1.00/IV/2020.

Suwitri, S. (2014). Konsep Dasar Kebijakan Publik MODUL 1. Analisis Kebijakan Publik,(2),1–51.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>

Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahyudi, A. (2016). *Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Desawaringin Barat*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(2), 99–103. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.02.1>

Wardhani, A. P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. (2016). *Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai ( Studi kasus di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Desa Semarang)*. Journal Of Management, 2(2), 1–12.

winarno budi. (2012). *Kebijakan publik : Teori , proses, dan studi kasu*. Yogyakarta: CAPS.

Zakharia, Herman. 2021. “*Data Terkini Korban Virus Corona di Indonesia di Bulan Juni 2021*”.Jakarta: *Merdeka.com*. (30 Juni 2021).